

BAB III

SOFT POWER TIONGKOK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KAMBOJA

Tiongkok dan Kamboja yang telah memiliki hubungan ratusan tahun sejak masa dinasti Tiongkok dan Kerajaan Angkor Kamboja telah memasuki 60 tahun hubungan resmi mereka. Berbagai kerja sama dan kesepakatan telah mereka jalani, menandakan kuatnya hubungan kedua negara. Dari awal disepakati kerja sama bilateral *comprehensive partnership* yang berkembang menjadi *comprehensive strategic partnership*, kerja sama kedua negara pada skema besar Tiongkok, *One Belt, One Road Policy*, kerja sama Lancang – Mekong, hingga pengembangan zona ekonomi khusus Sihanoukville di salah satu provinsi Kamboja. Bagi Kamboja, Tiongkok adalah mitra utama dan kunci dari pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonominya melalui berbagai bantuan dan pinjaman telah diberikan Tiongkok untuk Kamboja.

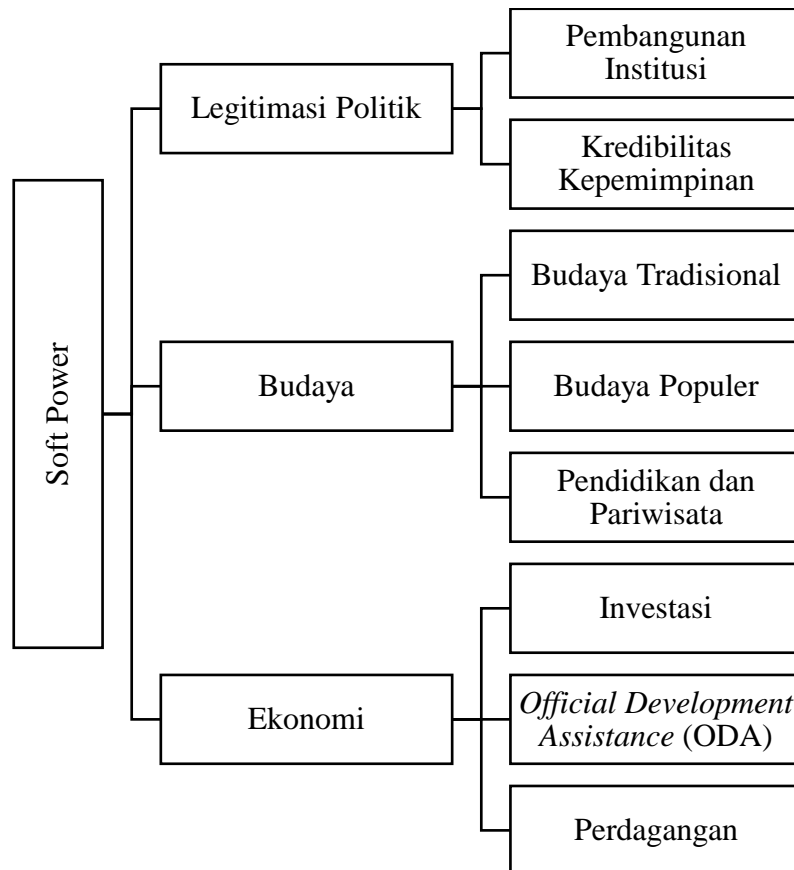
Bagi Tiongkok, Kamboja adalah mitra internasional dan sekutu diplomatiknya serta sebagaimana disampaikan oleh Presiden Xi Jinping bahwa Kamboja merupakan tetangga yang baik. Hal tersebut didukung oleh Tiongkok yang menjadi pemberi bantuan terbesar ke Kamboja. Terhitung sejak tahun 1992, Tiongkok sudah memberikan lebih dari US\$ 200 juta ke Kamboja setiap tahun, menyediakan sekitar US\$ 3 miliar untuk pinjaman dan hibah kepada Kamboja dan sekitar US\$ 10 miliar total investasi Tiongkok di Kamboja antara tahun 1994 hingga 2013, investasi tersebut berfokus pada bidang proyek infrastruktur,

pertambangan, pertanian, produksi garmen dan bendungan tenaga air (Vaesna, 2016).

Pada bab pertama bagian teori, telah dipaparkan yang intinya bahwa *soft power* ialah kemampuan untuk mempengaruhi negara lain untuk mengikuti tujuannya melalui daya tarik. Dalam konteks *soft power* Tiongkok, kebijakannya terlihat akomodatif, partisipatif dalam organisasi regional, ia juga kerap memberikan bantuan asing ke negara-negara mitranya dengan jumlah yang tidak sedikit, terlebih hubungan ekonomi Tiongkok dengan para mitranya dianggap banyak memberikan manfaat. Sehingga muncul pandangan bahwa meningkatnya *soft power* Tiongkok di dunia adalah usahanya untuk menjadi masyarakat internasional yang bertanggung jawab dan bermanfaat nyata melalui bantuan, perdagangan dan investasi (Thomas Lum, Wayne M. Morrison, and Bruce Vaughn, 2008). Berdasarkan dari bagian landasan konsep pada bab 1, penulis menganalisis *soft power* Tiongkok berdasarkan pada visualisasi Gambar 3.1 dibawah ini:

Gambar III.1

Pemetaan *Soft Power* Dalam Penelitian Ini



Sumber: Tsygankov, 2006; Nye, 2004; Minxin, 2004; Lee & Melissen, 2011

Pada penelitian ini, penulis memetakan *soft power* Tiongkok di Kamboja seperti pada gambar 3.1. yaitu legitimasi politik sebagai pembentuk citra melalui pembangunan institusi dan kredibilitas kepemimpinan, sesuai dengan yang dikatakan oleh Tsygankov (Tsygankov, 2006). Budaya merupakan salah satu dari alat *soft power* sebagaimana yang dikatakan oleh Joseph Nye Jr bahwa sumber daya dari *soft power* salah satunya adalah budaya, dan budaya adalah seperangkat nilai dan praktek yang memberikan makna bagi masyarakat (Nye, 2004). Dan dalam

pembagian *soft power* budaya, penulis membagi menjadi tiga yaitu: budaya populer, budaya tradisional, pendidikan dan pariwisata. Pada buku Joseph Nye sub bab *culture as a source of soft power*, budaya populer atau *popular culture* dan pendidikan atau *academic and scientific exchanges* juga termasuk dalam sumber daya *soft power* (Nye, 2004). Sedangkan budaya tradisional diambil karena subjek dari penelitian ini ialah Tiongkok. Berdasarkan argumen dari Pei Minxin, direktur dari *the keck center for international and strategic studies*, bahwa sumber utama dari *soft power* Tiongkok ialah budaya tradisionalnya (Minxin, 2004). Sehingga penulis merasa bahwa budaya tradisional Tiongkok di Kamboja juga perlu dimasukkan.

Yang kedua ialah bidang ekonomi. Dalam buku Joseph Nye, ekonomi justru tidak termasuk dalam *soft power* karena lebih cenderung ke *hard power*. Namun muncul pertanyaan, jika negara A memberikan bantuan ekonomi ke negara B tanpa meminta imbalan apapun secara eksplisit atau implisit, apakah itu *soft power* atau *hard power*?. Meskipun ekonomi penting bagi *hard power*, di saat yang sama pertumbuhan ekonomi yang cepat dan sukses dapat menginspirasi persaingan model pembangunan suatu negara. Dan juga, hubungan perdagangan, dan investasi yang mendalam dapat mempromosikan keterikatan yang efektif sehingga dapat memfasilitasi *soft power*. Bantuan ekonomi untuk negara-negara dunia ketiga dapat menjadi sumber *soft power* yang normatif. Yang dimaksud normatif ialah negara lain menganggap kebijakan dan peran internasional sebagai hal yang sah dan dapat dibenarkan. (Lee & Melissen, 2011). Untuk itu, penulis memasukkan bidang ekonomi sebagai salah satu bentuk *soft power* Tiongkok di Kamboja.

III.1 Legitimasi Politik

Dalam tulisan Tsygankov, legitimasi politik diartikan sebagai pembangunan institusi dan kredibilitas kepemimpinan, sehingga hal tersebut hanya relevan untuk suatu kawasan daripada hanya ke satu negara. Untuk itu, pada bagian pertama dari *soft power* Tiongkok ini akan dilihat bagaimana Tiongkok merubah citranya di Asia Tenggara melalui pembangunan institusi dan kredibilitas kepemimpinannya.

III.1.1 Pembangunan Institusi

Di tahun 1990-an saat mendekati akhir dari Perang Dingin, Tiongkok mulai memperbaiki dan menormalisasi hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara. Tiongkok juga mengakhiri dukungannya terhadap negara-negara komunis di Asia Tenggara. Hal ini menjadi pembuka jalan bagi perkembangan hubungannya dengan negara-negara ASEAN dengan membangun dan melanjutkan hubungan diplomatik dengan negara-negara anggota ASEAN pada saat itu (Xiao, 2009).

Bantuan Tiongkok yang sangat berarti ialah pada krisis keuangan tahun 1997 yang melanda Asia. Dengan memutuskan untuk tidak mendevaluasi mata uangnya, membuat Tiongkok dapat membantu menstabilkan situasi ekonomi regional dan membantu mengatasi krisis di seluruh kawasan. Dan Tiongkok juga memberi bantuan secara bilateral dan melalui *International Monetary Fund* (IMF) ke beberapa negara Asia Tenggara yang dilanda krisis.

Negara-negara Asia Tenggara sendiri masih menyimpan persepsi Tiongkok sebagai ancaman di Asia Tenggara. Tiongkok pun merasa perlu untuk melakukan upaya untuk merubah persepsi negatif dan kekhawatiran negara-negara Asia

Tenggara tersebut bahwa ia adalah peluang bukan ancaman. Kerja sama regional memberikan momentum bagi Tiongkok untuk melakukan upayanya tadi. Tiongkok melakukan inisiatif yang berani dengan membentuk *Free Trade Area* (FTA) dengan ASEAN. Salah satu faktor kontribusi Tiongkok pada FTA dengan ASEAN ialah ASEAN yang meminta dukungan Tiongkok untuk mendorong FTA pada tahun 1999, meskipun ASEAN telah memiliki rencana untuk membuat FTA. Faktor tersebut menjadi modal Tiongkok untuk semakin mendekati negara-negara Asia Tenggara (Xiao, 2009).

Pembangunan kerja sama yang diinisiasi Tiongkok dengan skala geografis yang sangat luas ialah *Belt and Road Initiative* (BRI). Dari rencana awal yang mencakup 28 negara kini diperluas menjadi 65 negara. Skema ini menggabungkan beberapa proyek baru dan lama, memperkuat infrastruktur keras dan lunak, dan ikatan budaya karena mencakup sekitar 4,4 miliar penduduk (Globaltimes.cn, 2017). Pada Maret 2015, terdapat beberapa poin tujuan kebijakan khusus BRI yang disempurnakan, yaitu:

1. Meningkatkan komunikasi antar pemerintah untuk kebijakan pemerintah tingkat tinggi yang lebih selaras seperti strategi pembangunan ekonomi dan rencana kerja sama regional.
2. Memperkuat koordinasi rencana infrastruktur agar jaringan infrastruktur keras lebih terhubung seperti sistem transportasi dan jaringan listrik.
3. Mendorong pengembangan infrastruktur lunak seperti penandatanganan perjanjian perdagangan, penyelarasan standar peraturan dan peningkatan integrasi keuangan.

4. Memperkuat koneksi *people-to-people* dengan meningkatkan pertukaran pelajar, pakar, budaya dan pariwisata.

Tiongkok sebagai inisiator BRI tentu akan melakukan apapun untuk kelancaran proyek yang besar ini. Untuk itu, Tiongkok secara tegas memberikan modal dengan jumlah yang besar ke lembaga keuangan publiknya seperti *Chinese Development Bank (CDB)* dan *Export-Import Bank of China (EXIM)*. Salah dua bank tersebut menerapkan aturan serupa dengan utang pemerintah Tiongkok yaitu dengan suku bunga yang sangat rendah dan mereka juga memiliki akses pinjaman ke *People's Bank of China (PBOC)* yang memungkinkan mereka untuk dapat memberikan pinjaman dengan mudah ke perusahaan-perusahaan Tiongkok yang bekerja untuk proyek-proyek BRI, sehingga memungkinkan perusahaan milik negara Tiongkok menawarkan proyek yang lebih kompetitif daripada perusahaan asing lainnya (CSIS, 2017).

Rencana besar yang mencakup geografis Eurasia ini dapat menjadi sarana Tiongkok untuk memanfaatkan ekonominya yang cukup besar, karena negara-negara yang menerima proyek BRI cenderung tertarik dengan investasi penyediaan infrastruktur keras (CSIS, 2017). Dari sini terlihat bahwa dengan Tiongkok mencakup banyak negara di Eurasia dan sekitarnya melalui BRI akan meningkatkan citra baik Tiongkok diantara negara-negara yang menerima proyek BRI, karena Tiongkok dapat menjadi penyedia infrastruktur yang mendukung BRI di negara-negara penerimanya. Kemudian kebijakan khusus BRI akan membuat negara-negara penerima mengeluarkan kebijakan yang selaras dengan Tiongkok, artinya hal ini akan membuat pengaruh Tiongkok semakin besar, sehingga

posibilitas di kemudian hari Tiongkok akan dianggap sebagai pemimpin diantara negara-negara penerima BRI.

III.1.2 Kredibilitas Kepemimpinan

Tiongkok, salah satu negara besar di Asia, ingin menunjukkan bahwa kebangkitannya di Asia bukanlah ancaman. Dan sebagai negara besar yang bekerja sama dengan negara-negara di sekitarnya, tentu Tiongkok dianggap sebagai pemimpin dengan pengaruh yang besar di kawasan. Tidak ingin kebangkitannya dianggap sebagai ancaman Tiongkok memiliki pedoman kebijakan luar negerinya terhadap negara-negara di sekitarnya yaitu Mu Lin yaitu membangun lingkungan yang bersahabat, An Lin yaitu membangun lingkungan yang tenang, dan Fu Lin yaitu membangun lingkungan yang makmur. Ketiga pedoman ini disampaikan oleh PM Wen Jiabao yang pertama kalinya mengikuti KTT Tiongkok-ASEAN (Xiao, 2009). Penyampaian pedoman kebijakan luar negeri tersebut menjadi salah satu upaya Tiongkok agar membangun citranya di Asia Tenggara agar negara-negara Asia Tenggara melihat Tiongkok sebagai negara besar yang juga dapat memimpin kawasan dengan kredibilitas yang baik.

Kemudian Tiongkok juga sangat mendorong integrasi ekonomi di Asia, salah satu upayanya ialah melalui pakta perdagangan regional bersama ASEAN, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru yang bernama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Tiongkok sendiri sangat mendukung peran ASEAN pada pakta perdagangan ini dan untuk menetapkan standar tinggi guna menginspirasi sistem ekonomi dunia dalam mencapai tingkat keterbukaan dimana semua orang mendapat manfaat (Times T. S., 2018). Meskipun proposal RCEP diajukan oleh ASEAN, namun sebagai penyandang ekonomi

terbesar dari anggota lainnya di RCEP, Tiongkok mampu dan bertanggung jawab dalam memainkan peran penting dan mempercepat negosiasi RCEP secara positif dan aktif. Dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat dalam 10 tahun pasca bergabungnya dengan WTO, Tiongkok dapat memegang peran penting pada negosiasi RCEP. Di tahun 2015, PM Li Keqiang menyampaikan bahwa Tiongkok bersedia untuk bekerja sama dengan semua pihak dan aktif mempromosikan proses negosiasi (MOFCOM, 2014).

Kebangkitan damai Tiongkok sebagai negara besar di kawasan dan partisipasinya yang aktif tentu membuat kredibilitasnya membaik. Citranya sebagai ancaman pun perlahan memudar ditandai dengan bersedianya negara-negara di sekitarnya untuk bekerja sama dengan Tiongkok. Kredibilitasnya terlihat melalui komitmennya mendukung penuh RCEP dan menjadi penyedia infrastruktur keras untuk proyek BRI. Kredibilitasnya ini akan mendukung citra baiknya di kawasan sehingga akan mempermudah kelancaran agenda kebijakan luar negeri Tiongkok yang lainnya.

III.2 Budaya

Seiring dengan ekonominya yang meningkat pesat, kebutuhan untuk meningkatkan *soft power* di bidang lain akan muncul, diantaranya melalui budaya. Hal tersebut guna meningkatkan hubungan Tiongkok dengan negara lain sehingga harmonis dan agar masyarakat internasional semakin mengetahui dan mengenal tentang Tiongkok. Upaya penyaluran budaya Tiongkok ke dunia internasional pun lebih luas ke berbagai kegiatan budaya seperti pertunjukan musik, pameran seni dan acara-acara besar lainnya seperti Olimpiade tahun 2008 dan *World Expo* tahun 2010 (Lihua, 2015).

Berdasar dari kebijakan *huaqiao* (Orang Tiongkok yang menetap di luar negara Tiongkok), memudahkan Tiongkok dalam penyebaran budayanya karena mereka tinggal di luar Tiongkok (Ming, 2018). Penyebaran budaya Tiongkok tersebut juga dirasakan oleh kerabat dekatnya di Asia Tenggara, Kamboja. Dengan kerja sama bilateral *comprehensive strategic partnership*, tentu Kamboja mendapat efek yang signifikan dari *soft power* budaya Tiongkok. *Huaqiao* juga terdapat di Kamboja yang umumnya memproyeksikan *soft power* Tiongkok lewat penyebaran budaya. Fenomena yang menjadi tanda pengaruh signifikannya *soft power* budaya Tiongkok di Kamboja ialah tahun baru Tiongkok dan festival tradisional Kamboja dirayakan di seluruh negeri oleh orang Kamboja keturunan Tionghoa, meskipun tahun baru Tiongkok bukan menjadi hari libur nasional di Kamboja (Xinhua, 2014).

Dari hal diatas akan dilihat *soft power* budaya Tiongkok di Kamboja melalui tiga aspek yaitu: 1. Budaya tradisional yang isinya membahas dari segi populasi, penyebaran bahasa dan perayaan hari besar. 2. Budaya populer yang isinya membahas dari musik dan film. 3. Pendidikan dan pariwisata. Ketiga aspek tersebut yang dirasa cukup memberi perwakilan dari *soft power* budaya Tiongkok di Kamboja. Karena ketiga aspek tersebutlah yang paling dekat dan cukup berpengaruh langsung terhadap masyarakat, sehingga bentuk *soft power* seperti beberapa aspek yang disebutkan tadi akan dengan mudah mempengaruhi masyarakat.

III.2.1 Budaya Tradisional

Berdasarkan dengan *huaqiao*, perlu diketahui bahwa etnis Tionghoa di Kamboja sudah ada sejak abad pertama hingga ketujuh di Kerajaan Funan pada masa peradaban pra-angkor. Zhou Daguan juga memaparkan bahwa pada abad ke

13 telah ada beberapa kelompok etnis Tiongkok di Kamboja, akan tetapi baru pada abad ke 17 sebagian besar etnis Tiongkok berdatangan ke Kamboja (Filippi, 2013). Diperkirakan pada abad ke 17 etnis Tiongkok di Kamboja berjumlah 425.000 jiwa dan berkurang menjadi 61.400 jiwa sebagai akibat dari pemberontakan *Khmer Rouge* dan penganiayaan yang dilakukan oleh Vietnam. Etnis Tiongkok di Kamboja terbagi menjadi lima kelompok yaitu Teochiu, Kanton, Hokkien, Hakka dan Hainan (Ross, 1987). Dari hal diatas tentu budaya Tiongkok di Kamboja sudah berkembang di Kamboja sebelum *soft power* budaya itu sendiri. Beberapa bahasa Khmer pun turut diadopsi dari bahasa mandarin seperti *kong* dan *ma* yang artinya kakek dan nenek (Kaing Menghun, Kim Samath, 2010).

Penggunaan budaya oleh Tiongkok sebagai salah satu instrument *soft power* guna mempengaruhi tindakan negara dan masyarakat rasanya cukup baik. Dengan telah adanya etnis Tionghoa di Kamboja sejak abad pertama, etnis Sino-Kamboja lahir dari perkawinan antara kedua etnis dan budaya Tiongkok juga secara tidak langsung telah mengakar di kehidupan masyarakat Kamboja. Selain itu, promosi bahasa mandarin menjadi salah satu fokus Tiongkok dalam kebangkitan budayanya. Di Kamboja, pada tahun 1970 terdapat lebih dari 200 sekolah Tiongkok dengan 150.000 siswa yang kemudian diperintahkan untuk ditutup oleh Jendral Lon Nol, meskipun ia seorang etnis Sino-Kamboja. Barulah dibuka kembali dengan kebijakan PM Hun Sen yang memberikan hak bagi minoritas di Kamboja, dari situlah etnis Tionghoa bangkit kembali dan pendidikan bahasa mandarin kembali tumbuh.

Pada tahun 1998 dan 1999, pertumbuhan pendidikan bahasa mandarin meningkat secara signifikan menjadi 60 sekolah yang sebelumnya hanya 13 sekolah

pada tahun 1995. Pembangunan sekolah didanai oleh pemerintah Tiongkok, sehingga membuat pemerintah Kamboja mengembalikan sekolah-sekolah Tiongkok yang dahulu ditutup pada masa rezim Lon Nol (Marks, 2000). Pertumbuhan pendidikan bahasa mandarin tersebut tentu ada kaitannya dengan semakin meningkatnya minat masyarakat Kamboja dalam mempelajari bahasa mandarin. Menurut sebuah komunitas Sino – Kamboja bahwa terdapat sekitar 30.000 siswa yang mempelajari bahasa mandarin. Dengan meningkatnya *soft power* Tiongkok di Kamboja, masyarakat berpendapat bahwa mempelajari bahasa mandarin merupakan hal yang penting bagi pencarian ekonomi dan keuntungan bisnis, mengingat cukup banyak investasi Tiongkok di Kamboja (Loy, 2013).

Ditambah, pemerintah Kamboja juga turut mempromosikan bahasa mandarin di Kamboja, selain karena hubungan keduanya yang cukup dekat, banyak juga investor papan atas yang beretnis Tionghoa. Komunitas masyarakat berbahasa mandarin juga sangat berpengaruh pada ekonomi dan politik di Kamboja meskipun jumlahnya hanya 15 juta penduduk yang mana 5% dari populasi Kamboja. Alasan tersebut cukup kuat melihat kekuatan pengaruh dan kepentingan Tiongkok di Kamboja (Lixiong, 2015).

Selain itu, dari pendidikan bahasa mandarin yang telah disebutkan diatas, dalam penguatan *soft power* budaya tradisionalnya, Tiongkok juga memiliki proyek pengembangan bahasa mandarin di seluruh dunia melalui *Confucius Institute* (CI). Terhitung dari tahun 2004 hingga 2011, jumlah CI yang sudah berdiri sebanyak 353 CI dengan sekitar 473 ruang kelas yang tersebar di 104 negara (Hanban, 2011). Di Kamboja, CI bekerja sama dengan *Royal Academy of Cambodia* dengan 5.000 siswa dan 13 cabang yang tersebar di negara tersebut. CI di Kamboja dirasa

memiliki peran yang cukup besar terhadap jalannya *Belt and Road Initiative*, karena banyaknya masyarakat yang berminat mempelajari bahasa mandarin untuk pekerjaan, bisnis dan keuntungan ekonomi (Meyn, 2013).

Pertumbuhan signifikan CI di Kamboja juga tak lepas dari akar utama selain investasi, yaitu peningkatan wisatawan Tiongkok ke Kamboja. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Kamboja, bahkan sekitar tujuh kementerian Kamboja mengajukan permintaan untuk mengadakan pelatihan bahasa mandarin. Banyaknya permintaan tersebut membuat dibentuknya *Mandarin Center* di markas besar Kementerian Pertahanan di Phnom Penh. Terlepas dari tuduhan bahwa CI merupakan senjata propaganda Tiongkok, kenyataannya di Kamboja mempelajari bahasa mandarin adalah sebuah peluang yang lebih menguntungkan daripada mempelajari bahasa inggris. Karena peluang tersebut ada dari bisnis Tiongkok yang telah berakar di Kamboja (James Riddick, 2017).

Pada tahun 2015, Kamboja dan Tiongkok mengadakan Gala Festival Musim Semi pertama. Acara yang diadakan di pulau Koh Pich tersebut guna membuka Tahun Baru Tiongkok yang jatuh dua hari kemudian. Sekitar 260 artis asal Tiongkok dan 150 warga Kamboja dihadirkan sebagai tamu undangan pada pertunjukan teater tersebut. Acara yang menampilkan berbagai pertunjukan seni tersebut dipercaya dapat memperkuat dan memperluas hubungan antara kedua negara melalui seni, sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Informasi, Khieu Kanharith. Namun yang paling jelas adalah adanya gambar Raja Norodom Sihanouk bersama Mao Zedong dan gambar Raja Norodom Sihamouni yang sedang berjabat tangan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, yang menjadi *background* dari panggung acara (Aria Danaparamita, 2015).

Gambar III.2

Background Panggung Gala Festival Musim Semi



Sumber: Aria Paramadina, 2015

Selain itu, etnis Tiongkok-Kamboja sebagai etnis minoritas terbanyak dan besarnya pengaruh Tiongkok, perayaan hari besarnya cukup banyak dirayakan di Kamboja termasuk oleh masyarakat etnis Khmer, yaitu Tahun Baru Imlek. Kebencian yang dahulu timbul akibat kenyataan bahwa Tiongkok berada di balik *Khmer Rouge* sudah semakin pudar. Akan tetapi lebih banyak masyarakat Kamboja yang turut merayakan Tahun Baru Imlek seperti di tahun 2018 ini. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Hun Sen melalui laman *facebook*-nya (Sophon, 2018).

Adanya tiga faktor dari *soft power* budaya tradisional yang dibahas diatas (populasi, bahasa dan perayaan hari besar) terlihat sangat dekat dan menempel dengan masyarakat. Populasi etnis Tionghoa di Kamboja cukup berpengaruh dalam mendukung *soft power* Tiongkok, meskipun hanya 0,1% namun ada juga etnis Sino-Kamboja yang juga menghormati budaya leluhur Tiongkoknya, sehingga bagi Tiongkok, sangat nyaman untuk bekerja sama dengan Kamboja. Walaupun sempat

melonjak sentimen *anti-chinese* yang disebabkan kenyataan bahwa Tiongkok yang menjadi dalang dibalik *Khmer Rouge*. Namun dengan dekatnya hubungan bilateral kedua negara, sentiment tersebut lambat laun menjadi kecintaan dan kebutuhan.

Hal tersebut telah terbukti dari beberapa penjelasan diatas yaitu banyaknya masyarakat yang sangat ingin mempelajari bahasa mandarin karena menjamurnya bisnis Tiongkok di Kamboja sehingga mempelajari bahasa mandarin menjadi kebutuhan bagi masyarakat Kamboja demi keuntungan dan pendapatan ekonomi. Dari situlah semakin banyak institusi pendidikan yang menyediakan pelajaran bahasa mandarin dan semakin banyaknya cabang CI yang tak hanya memberikan pelajaran bahasa mandarin, tapi juga budaya Tiongkok yang lain.

Dan kecintaan Kamboja terhadap Tiongkok terbukti dari ramainya masyarakat Kamboja yang turut merayakan Tahun Baru Imlek. Hal ini kembali kepada warga Sino-Kamboja yang masih menghormati budaya leluhur Tiongkoknya dan masyarakat lain yang juga antusias menyambut Tahun Baru Imlek. Pada Gala Festival Musim Semi juga ramai masyarakat yang datang untuk melihat berbagai penampilan seni dan budaya dari Tiongkok.

III.2.2 Budaya Populer

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga membuat akses informasi dan transportasi menjadi lebih cepat dan mudah. Untuk itu, budaya populer semakin mudah menyebar ke seluruh dunia. Seperti Amerika Serikat yang juga lebih dahulu melakukan *soft power* dari budaya populer, sebagai contoh film-film dan merk-merk ternama. Hal tersebut menyasar semua elemen masyarakat agar mengagumi nilai-nilai dari Amerika Serikat yang disajikan dalam film-film.

Bahkan ketika sentimen anti-amerika terjadi akibat Perang Irak, pasca hal tersebut citra Amerika Serikat di mata dunia kembali membaik yang mana budaya populer juga cukup berpengaruh.

Hal serupa juga dialami Tiongkok meskipun tanpa isu negatif. Masyarakat Kamboja banyak yang terpengaruh dari cerita rakyat Tiongkok yang dibuat menjadi film terkenal dan nilai-nilai dalam film-film tersebut. Film *A Tale of Three Kingdom* atau *Sam Kok* yang dikenal di Kamboja menjadi judul film Tiongkok yang populer di antara masyarakat Kamboja tentang film dari Tiongkok yang terkenal di Kamboja. Terlebih melalui film-film Tiongkok membuat filsafat kuno Tiongkok berpengaruh terhadap persepsi dan berakar pada masyarakat Kamboja, seperti konsep dan nilai-nilai dari film Tiongkok kerap kali diucapkan oleh masyarakat hingga mempublikasikan kutipan dari film dengan aktor favorit mereka di *Facebook*. Sehingga sesama masyarakat Kamboja lainnya dapat melihat, mengagumi dan belajar dari kutipan film tersebut. Bahkan beberapa korporat di Kamboja juga menggunakan cara serupa dalam mempromosikan produk mereka yaitu menggunakan citra aktor film dan ucapannya masing-masing (Po, 2017).

Dari segi musik, musisi beretnis Sino-Kamboja cukup berpengaruh dalam menyebarkan instrumen musik Tiongkok di Kamboja hingga digemari. Orkestra di Kuil Sam Uong menjadi satu-satunya grup musik yang memainkan instrumen tradisional Tiongkok seperti *Love, The Beautiful Maiden, Chinese Scenery* dan *The River* dengan menggunakan alat musik seperti sitar (sejenis harpa), seruling Tiongkok, erhu (instrument dawai yang dimainkan dengan busur), drum dan banjo (Nhean, 2014).

Instrumen budaya populer juga sama dengan budaya tradisional karena dekat dan menempel di masyarakat. Sama halnya dengan film *A Tale of Three Kingdom*, beberapa film lain dari Tiongkok yang populer di Kamboja juga digunakan kutipan-kutipannya sebagai motivasi ataupun promosi produk. Dari musik, penyanyi terkenal bernama Sokun Nisa yang beretnis Sino-Kamboja, lagunya sangat digemari masyarakat Kamboja. Dan juga, Sinn Sisamouth, seorang yang disebut sebagai Raja Musik di Kamboja juga beretnis Sino-Kamboja (Kaing Menghun, Kim Samath, 2010). Dari situ, dapat diambil asumsi bahwa musik di Kamboja juga banyak dipengaruhi oleh orang-orang Kamboja keturunan Tionghoa.

III.2.3 Pendidikan dan Pariwisata

Selain dari penyebaran dan penguatan pendidikan bahasa mandarin seperti yang dipaparkan sebelumnya, CI juga menawarkan beberapa peluang pendidikan kepada siswa-siswa Kamboja yang terdapat pada visi CI 2020 di Kamboja yaitu pembangunan cabang CI di seluruh provinsi Kamboja dengan target 50.000 siswa yang mempelajari budaya dan bahasa Tiongkok, mendirikan lembaga penelitian di *Royal Academy of Cambodia* dan di Tiongkok guna melanjutkan studi sejarah hubungan kedua negara dan memberikan program beasiswa bagi ratusan warga Kamboja setiap tahunnya yang akan menempuh pendidikan di Tiongkok hingga satu tahun (Meyn, 2013).

Seperti yang dijelaskan pada bagian teori, skema *soft power* melalui pendidikan juga cukup berpengaruh, yang telah diberi contoh yaitu Alexandr Yakovklev yang menjadi kunci liberalisasi pada masa Gorbachev setelah ia menempuh pendidikannya di Universitas Columbia. Skema pertukaran akademis dan beasiswa yang didanai pemerintah merupakan cara untuk mempromosikan dan

meningkatkan *soft power* yang efektif. Berbeda dari segi ekonomi, skema ini menginvestasikan pemimpin di masa depan. Dari beberapa pengalaman, banyak para sarjana yang ingin memberikan sesuatu kepada negara sponsor beasiswa pasca kelulusannya (Hart, 2017). Dari berbagai upaya *soft power* Tiongkok di Kamboja, skema pendidikan ini juga dilakukan sebagai pelengkap *soft power* ekonominya di Kamboja.

Tiongkok juga terlihat fokus pada *soft power* pendidikan ini, seperti pada tahun 2016 menyediakan lebih dari 2.000 beasiswa bagi para siswa di Kamboja. Juga pada tahun akademik 2017-2018 pemerintah Tiongkok telah memberikan beasiswa kepada 181 siswa dari Kamboja untuk menempuh pendidikan tinggi di Tiongkok. Pemerintah Kamboja juga mendorong para penerima beasiswa untuk mempelajari budaya Tiongkok, karena budaya dapat memperdalam hubungan antar masyarakat dari kedua negara (Xinhua, 2017).

Dari berbagai hal sepertinya Tiongkok semakin diminati masyarakat Kamboja, salah satu alasan bahwa banyak siswa Kamboja yang sangat ingin menempuh pendidikan di Tiongkok ialah hubungan yang baik antar kedua negara dan inisiatif *One Belt, One Road*, sehingga menganggap bahwa mendekati Tiongkok lebih menguntungkan di masa depan bagi karirnya. Ditambah dengan terbukanya universitas-universitas di Tiongkok terhadap pelajar dari Kamboja seperti Universitas Guangxi yang akan mengadakan kursus bahasa Khmer dan menyediakan program pertukaran bagi siswa dan pengajar pada tahun 2020 (Chheng, 2018).

Dari pariwisata, sebagai negara yang memiliki tiga situs warisan dunia Angkor Wat sebagai ikon utama pariwisata, Kuil Preah Vihear dan situs arkeologi Sambor Prei Kuk serta Sungai Mekong yang ditinggali oleh lumba-lumba air tawar. Kamboja dapat menjadi destinasi unik untuk *traveling*. Pada sektor pariwisata ini Tiongkok juga membantu meningkatkan pariwisata di Kamboja, terlihat dari statistik Kementerian Pariwisata Kamboja yang meningkat sebesar 42,7% dalam setengah tahun pertama pada 2017 dengan 20,4% dari total statistik ialah wisatawan asal Tiongkok. Hal ini menjadi salah satu visi dari strategi *China Ready* tahun 2020 yang bertujuan untuk menarik 2 juta wisatawan Tiongkok ke Kamboja setiap tahunnya (Xinhua, 2017).

Dan di tahun 2018, peningkatan statistik tersebut kembali terjadi, sekitar lebih dari 1,27 juta wisatawan asal Tiongkok mengunjungi Kamboja dari bulan Januari hingga Agustus 2018. Presentase yang naik 72% dari tahun lalu dengan Tiongkok sebagai penyumbang wisatawan asing terbesar ke Kamboja sebanyak 32,4%. Meningkatnya wisatawan asing tentu menjadi keuntungan bagi Kamboja, seperti tahun lalu, sektor pariwisata Kamboja menyumbang sekitar 13% terhadap PDB negara dengan pendapatan kotor sekitar \$ 3,6 miliar (Xinhua, 2018).

CI dan banyaknya tawaran beasiswa bagi pelajar di Kamboja memberikan potensi sumber daya manusia yang berkembang bagi Kamboja. Seperti yang dibahas sebelumnya, penyediaan beasiswa merupakan investasi bagi para pemimpin masa depan dan mempelajari budaya suatu negara dapat memperdalam hubungan erat antar masyarakat. Untuk itu, dengan penyediaan beasiswa dari Tiongkok dan dorongan untuk mempelajari budaya Tiongkok bagi para pelajar

Kamboja, akan dapat menjadi proyeksi kedepan untuk semakin memperdalam dan mempererat hubungan bilateral Tiongkok dan Kamboja.

III.3 Ekonomi

Hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Kamboja diakui secara resmi pada sekitar tahun 1955 pasca Raja Norodom Sihanouk mendapatkan kemerdekaan dan mengeluarkan kebijakan netral terhadap dukungan ekonomi dari beberapa negara besar. Ekonomi Kamboja juga sempat dua kali runtuh akibat perbuatan *Khmer Rouge* dan konflik militer tahun 1960 – 1990. Dan kemudian ekonomi Kamboja mulai tumbuh kembali pada tahun 1991 dengan seketika membuka diri untuk investasi asing (Ly, 2018). Meskipun pada kenyataannya aktivitas hubungan ekonomi kedua negara telah ada selama berabad-abad. Hingga pada dua dekade terakhir yang mana Tiongkok telah berubah menjadi salah satu kekuatan ekonomi global, ia memantapkan dirinya sebagai mitra terpenting bagi Kamboja (Graceffo, 2017).

Liberalisasi ekonomi Kamboja membuka peluang Tiongkok untuk mendekati Kamboja, terlebih Kamboja juga terintegrasi dengan dua organisasi perdagangan yang mana ia bergabung menjadi anggota penuh organisasi regional ASEAN pada tahun 1999 dan bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) pada 2007. Dan seperti yang telah diketahui bahwa Tiongkok juga bergabung dengan ASEAN *plus three* dan WTO (Chreung Sok-Tharath, Kong Sophal, Nin Menakak, Sar Socheat, 2013). Hal tersebut mempermudah relasi ekonomi mereka dan semakin mudah bagi Tiongkok melancarkan *soft power*-nya ke Kamboja. Dan bagi Kamboja, *soft power* Tiongkok dianggap sangat penting karena membantu

pertumbuhan dan pembangunan negaranya. Sedangkan bagi Tiongkok, dukungan politik yang berbasis di Asia Tenggara sangat penting bagi beberapa proyek besar Tiongkok.

III.3.1 Investasi

Meskipun perjanjian *comprehensive partnership* antara Tiongkok dan Kamboja baru ditanda tangani pada tahun 2006, namun investasi Tiongkok di Kamboja dimulai pada tahun 1994, terlebih hubungan bilateral yang dekat antara Tiongkok dan Kamboja ditambah dengan berbagai kerja sama yang kedua negara jalani seperti pengembangan Zona Ekonomi Khusus Sihanoukville, *Lancang – Mekong Cooperation* (LMC), hingga *Belt and Road Initiative* (BRI) tentu membuat Tiongkok banyak menaruh investasi di Kamboja, yang pada dasarnya investasi-investasi tersebut berguna untuk mendukung kerja sama yang telah mereka sepakati. Investasi Tiongkok di Kamboja terus meningkat, terhitung pada tahun 2017 saja Tiongkok telah memberikan hampir 30% modal investasi kepada Kamboja.

Investasi tersebut didistribusikan ke berbagai sektor seperti garmen, tekstil, taman industri, pembangkit listrik, minyak bumi, semen, hotel dan resor, dan sebagainya. Yang mana mayoritas perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Kamboja dimiliki oleh negara. Banyaknya etnis Tiongkok-Kamboja yang berbahasa mandarin mendukung para investor untuk berinvestasi di Kamboja, sehingga jika dilihat dari dimulainya Tiongkok berinvestasi di Kamboja, peningkatan investasi terus terjadi. Membuat Tiongkok menjadi investor terbesar di Kamboja dengan total investasi dari 1994 hingga 2009 sebesar lebih dari US \$ 5,56 miliar (Sotharith, 2010).

Tabel III.1
Investasi Tiongkok di Kamboja

Tahun	Jumlah Proyek	Jumlah Modal Investasi (USD)
1994	1	7,000,000.00
1995	9	2,937,531.00
1996	29	38,156,703.14
1997	29	36,157,049.09
1998	39	104,729,154.73
1999	26	46,034,912.00
2000	7	28,405,061.70
2001	5	5,034,745.00
2002	8	23,030,130.00
2003	10	31,006,918.00
2004	21	77,065,242.13
2005	41	444,122,349.51
2006	32	274,339,894.70
2007	32	116,131,944.35
2008	24	4,369,202,447
2009	14	247,586,097
1994-2009	137	5,850,940,179.85

Sumber: Sotharith, 2010, hal: 19

Tabel III.2

Modal Investasi Tiongkok Pada Berbagai Sektor di Kamboja

No.	Sektor	Total dalam % Investasi Tiongkok di Setiap Sektor
1.	Telekomunikasi	8.0%
2.	Pertambangan	83.5%
3.	Minyak Bumi	99.8%
4.	Energi	91.7%
5.	Pembangunan	1.3%
6.	Pariwisata	60.7%
7.	Garmen	40.1%
8.	Pertanian	25.6%
9.	Jasa lain-lain	4.4%
10.	Industri lain-lain	38.1%

Sumber: Chandarany Ouch, 2011

Dilihat dari tabel 3.1, investasi di Tiongkok terus meningkat di Kamboja dan sektor minyak mendapat porsi lebih banyak dari modal investasi Tiongkok di Kamboja. Bahkan data mengenai modal investasi menunjukkan bahwa Tiongkok semakin menjadi investor utama di Kamboja mengalahkan investor lokal di tahun 2016. Dari periode lima tahun sejak 2012 yang mana Kamboja mengalami peningkatan investasi sebesar 24% yaitu US\$ 3,4 miliar dari US\$ 2,9 miliar (CDC, 2017).

Tabel III.3

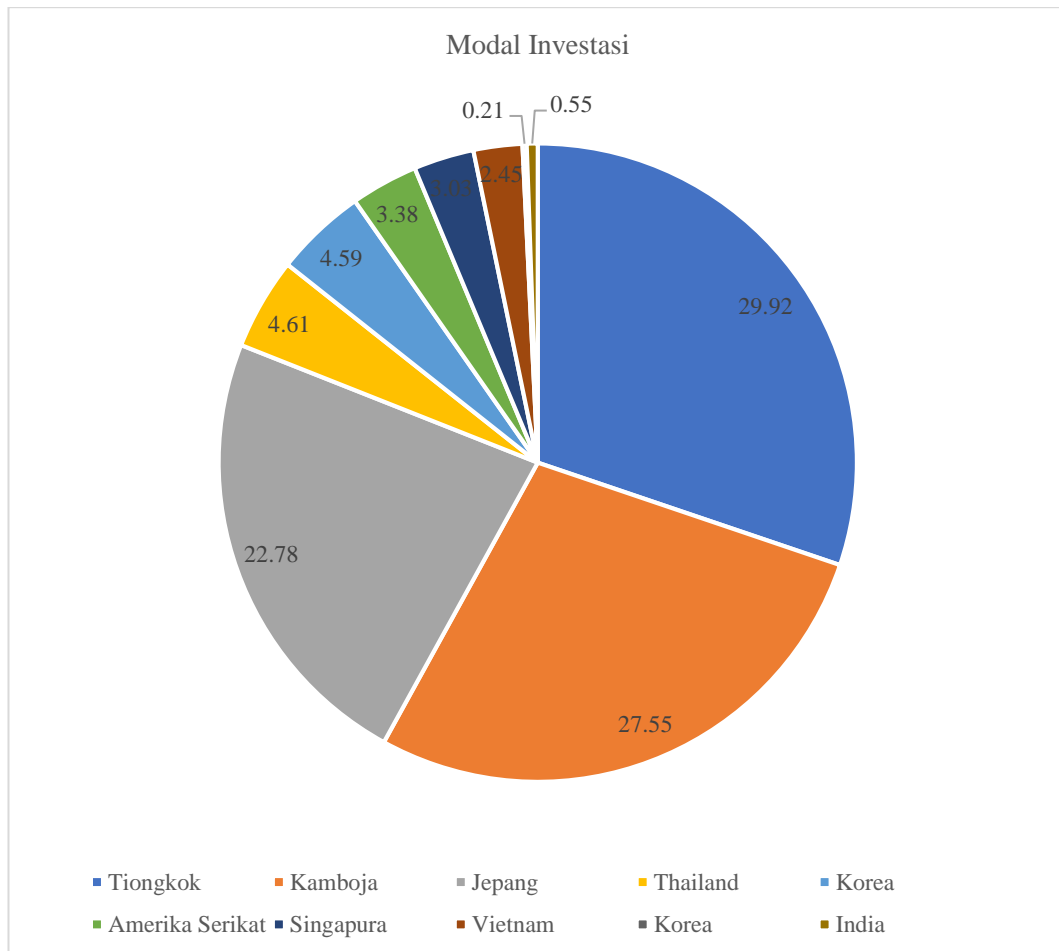
Modal Investasi di Kamboja Berdasarkan Negara

Tahun	2012		2013		2014		Tahun	2015		2016	
Total Modal	\$ 2.9 Miliar		\$ 4.9 Miliar		\$ 3.9 Miliar		Total Modal	\$ 4.6 Miliar		\$ 3.6 Miliar	
Peringkat	Negara	%	Negara	%	Negara	%	Peringkat	Negara	%	Negara	%
1.	Kamboja	42.08	Kamboja	66.80	Kamboja	64.00	1.	Kamboja	69.28	Tiongkok	29.92
2.	Tiongkok	20.69	Tiongkok	15.68	Tiongkok	24.44	2.	Tiongkok	18.62	Kamboja	27.55
3.	Korea	9.89	Vietnam	6.10	Malaysia	2.18	3.	Inggris	3.0	Jepang	22.78
4.	Jepang	9.15	Thailand	4.37	Jepang	1.72	4.	Singapura	2.18	Thailand	4.61
5.	Malaysia	6.04	Korea	1.76	Korea	1.66	5.	Vietnam	1.92	Korea	4.59
6.	Thailand	4.53	Jepang	1.59	Vietnam	1.26	6.	Malaysia	1.61	Amerika Serikat	3.38
7.	Vietnam	2.89	Malaysia	1.04	Inggris	1.13	7.	Jepang	1.28	Singapura	3.03
8.	Singapura	2.59	Singapura	1.03	Singapura	0.89	8.	Thailand	1.18	Vietnam	2.45
9.	Inggris	0.51	Inggris	0.43	Thailand	0.88	9.	Korea	0.21	Korea	0.21
10.	Amerika Serikat	0.42	Prancis	0.93	Australia	0.51	10.	Kanada	0.19	India	0.55

Sumber: Council for the Development of Cambodia, 2017

Grafik III.1

Modal Investasi di Kamboja Berdasarkan Negara Tahun 2016 (%)



Sumber: *Council for the Development of Cambodia, 2017*

Investasi Tiongkok yang paling mencolok berada di Zona Ekonomi Khusus Sihanoukville. Sejak 2013, daerah tersebut semakin banyak diisi oleh kasino-kasino dari Tiongkok hingga mendapat julukan Macau II. Kota yang dahulu sepi kini ramai oleh penduduk asing, mayoritasnya berasal dari Tiongkok. Sebagai satu-satunya pelabuhan laut di Kamboja, Sihanoukville menjadi salah satu rute perdagangan yang penting bagi BRI, sehingga menjadi fokus utama investasi Tiongkok di Kamboja dengan total \$ 1,1 miliar dalam setahun terakhir, meskipun investasi tersebut tidak secara langsung berasal dari keuangan BRI (Ellis-Peterson, 2018).

Meskipun mendapat kritik keras atas sisi negatif yang didapat di Sihanoukville seperti pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan dan ekonomi yang tertutup yang tidak menguntungkan bagi masyarakat setempat, PM Hun Sen membela Tiongkok bahwa kedatangan Tiongkok di Kamboja sangat menguntungkan, terutama bagi pembangunan infrastruktur, yang mana dalam waktu dekat akan dibangun jembatan di seberang Sungai Mekong, Provinsi Kratie (Ben Sokhean, 2018).

Dari investasi inilah akan muncul banyaknya peluang bisnis baru di Kamboja yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, terlepas dari isu yang beredar yang menyatakan bahwa banyaknya hal-hal negatif di Sihanoukville. Menjamurnya bisnis dari investasi Tiongkok di Kamboja akan sangat baik jika dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, untuk itulah seperti yang dibahas sebelumnya, tingginya antusias masyarakat Kamboja untuk mempelajari bahasa mandarin guna memaksimalkan investasi Tiongkok yang menjamur di Kamboja.

III.3.2 Bantuan/*Official Development Assistance* (ODA)

Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar dan kedekatan hubungannya dengan Kamboja, tentu Tiongkok telah banyak menggelontorkan dana bantuan bagi kerabatnya di Asia Tenggara tersebut. Terhitung selama periode empat tahun dari 2000 hingga 2009, Tiongkok telah memberikan dana hibah dengan total US\$ 204,41 juta. Dan di tahun 2009 saja, US\$ 79,8 juta dihibahkan oleh Tiongkok untuk Kamboja guna membiayai pembangunan jalan dari daerah O-Pong Mon ke Banlung. Bantuan yang diberikan oleh Tiongkok sangat membantu mempercepat perkembangan infrastruktur dan dapat direalisasikan dengan cepat serta tidak rumit karena tanpa persyaratan (Sotharith, 2010). Beberapa dana ODA

Tiongkok ke Kamboja dari tahun 2000 hingga 2009 yang berbentuk proyek pembangunan akan dirangkum pada table 3.4 dibawah ini.

Tabel III.4
Dana ODA Berbentuk Proyek dari Tiongkok untuk Kamboja

No.	Nama Proyek Resmi	Anggaran
1.	Pembangunan Jembatan Prek Kdam	28,783,664.00 USD
2.	Pembangunan Jembatan Prek Tamak	43,503, 619.00 USD
3.	Perencanaan dan Pembangunan Jalan Nasional dari Tbeng Meanchey ke Prasat Preah Vihear dan Jalan dari Thanl Bek ke Srayang-Koh Ker	57,800,000.00 USD
4.	Penelitian Terhadap Kereta Api Trans-Asia di Kamboja	2,898,500.00 USD
5.	Pembangunan Gedung Baru <i>Council of Ministers</i>	225,070,000.00 CNY
6.	Pembelian Peralatan untuk Menekan Penyelundupan dan Perdagangan Obat-Obatan Terlarang	500,000,000.00 CNY
7.	Pembangunan Informasi Sub-Kawasan Mekong	135,000,000.00 CNY
8.	Perbaikan Candi Chau Say Tevoda di Kawasan Angkor	4,500,000.00 CNY
9.	Perbaikan Jalan Nasional dari Ksach kandal ke Perbatasan Vietnam	71,512,717.00 USD
10.	Perbaikan Jalan Nasional dari Persimpangan Snuol ke Senmonorom Mondolkiri	51,900,000.00 USD
11.	Penyediaan Perpustakaan Elekonik bagi <i>Royal Academy of Cambodia</i>	80,810.00 USD
12.	Penyediaan Peralatan dan Kendaraan bagi Senat di Kerajaan	145,000.00 USD
13.	Penyediaan Peralatan dan Kendaraan bagi Kementrian Perhubungan dan Inspeksi Parlemen	72,500.00 USD
14.	Perbaikan Jalan Nasional dari Kratie ke Trapeang Kriel	63,410,000.00 USD
15.	Survey Terhadap Proyek Kebun Raya Nasional	30,000.00 CNY
16.	Perbaikan Jalan Nasional dari Battambang ke Pailin (Perbatasan Kamboja - Thailand)	41,880,000.00 USD

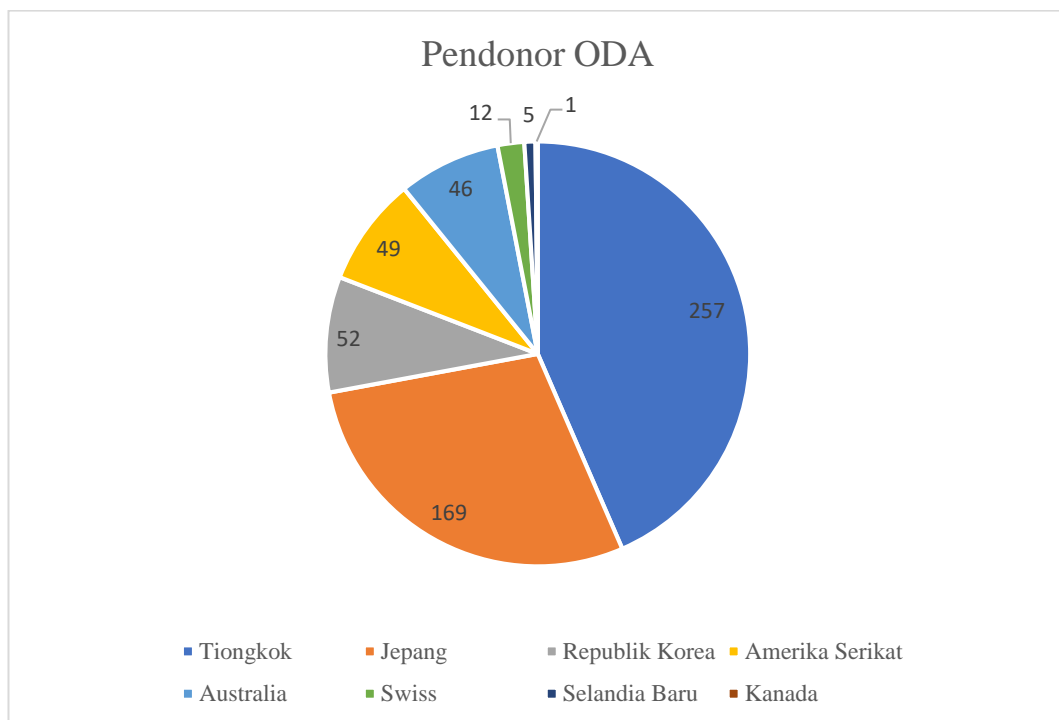
Sumber: Sotharith, 2010, hal: 21-22

Tidak hanya itu, cukup banyak bantuan yang telah diberikan Tiongkok ke Kamboja hingga Tiongkok juga dianggap sebagai pendonor bantuan utama ke Kamboja, selain investor utama. Terhitung sejak tahun 1992 Tiongkok telah memberikan dana sekitar US\$ 3 miliar kepada Kamboja yang berupa pinjaman lunak dan hibah. Dan yang lebih menguntungkan lagi bagi pemerintahan Kamboja, dengan kebijakan Tiongkok yang memberikan bantuan tanpa memberikan persyaratan, PM Hun Sen yang baru-baru ini membubarkan oposisi dan beberapa media, sangat senang akan hal tersebut karena dapat menjadi pendukung bagi masa kekuasaannya. Sehingga wajar jika pemerintah Kamboja mengapresiasi bantuan Tiongkok dengan mengatakan bahwa Tiongkok melakukan banyak hal di Kamboja meskipun sedikit bicaranya (Var, 2016).

Bahkan di awal tahun 2018, Tiongkok dan Kamboja bersama-sama menandatangani 19 perjanjian bantuan dan investasi sebagai tanda hubungan mereka yang semakin kuat. Dari 19 perjanjian tersebut, mencakup beberapa hal penting seperti pinjaman bagi *Overseas Cambodia Investment Corporation* dan *China Development Bank* dalam pembangunan bandara baru di provinsi Siem Reap, pembangunan jalan raya dari Phnom Penh ke Sihanoukville, peluncuran satelit pertama Kamboja yang akan dilakukan oleh *Cambodia's Royal Group Companies* dan *China Great Wall Industry Corporation*, serta beberapa yang lain untuk pasokan listrik dan bantuan untuk sektor pertanian. Dan diluar dari perjanjian tersebut, Tiongkok mengatakan masih memiliki janji untuk memberikan bantuan lain dengan total lebih dari US\$ 184 juta atau setara dengan lebih dari 1,2 miliar yuan (Thul, 2018). Kemudia pada grafik 3.2 menunjukkan bahwa di tahun 2018,

Tiongkok juga menjadi pendonor ODA terbesar bagi Kamboja dibanding beberapa negara lainnya.

Grafik III.2
Pendonor ODA ke Kamboja Tahun 2018 (Juta USD)



Sumber: *Cambodian Rehabilitation and Development Board, Council for the Development of Cambodia, 2018*

Dari banyaknya ODA yang diberikan Tiongkok ke Kamboja sebagai upaya membantu pembangunan infrastruktur Kamboja. Sebagai negara dengan salah satu

ekonomi terbawah di Asia Tenggara, Kamboja tentu merasa sangat bersyukur dengan berbagai bantuan yang diberikan Tiongkok. Selain itu, ODA yang berupa proyek-proyek pembangunan juga sejalan dengan strategi pembangunan Kamboja. Sehingga, pemerintah Kamboja akan merasa sangat terbantu dengan ODA yang diberikan oleh Tiongkok.

III.3.3 Perdagangan

Setelah perang dalam negeri berakhir, dengan komitmen politiknya Kamboja berupaya membuka diri terhadap dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan menjadi anggota penuh ASEAN di tahun 1999 dan menyusul menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) di tahun 2007. Sehingga dari bergabungnya dengan kedua organisasi ini, Kamboja berupaya meningkatkan kegiatan perdagangan internasionalnya untuk membantu pembangunan ekonomi negara. Selain itu, dengan bergabungnya ke kedua organisasi tadi ditambah dengan kerja samanya yang kuat dengan Tiongkok, semakin meningkatkan perdagangan antara Kamboja dengan Tiongkok. Terbukti dengan peningkatan perdagangan mereka yang naik 72 kali menjadi US\$ 933 juta, sangat signifikan daripada sebelum Kamboja bergabung dengan kedua organisasi tadi yaitu pada 1992.

Menariknya, sebagai salah satu negara ekonomi terendah dan volume perdagangan yang kecil di Asia Tenggara, Kamboja mendapatkan pembebasan pajak bagi 418 barang atau produknya dari Tiongkok. Namun, keuntungan tersebut masih belum dapat dimaksimalkan oleh Kamboja karena kekurangan sumber daya, produk-produk yang kurang mampu bersaing, informasi pasar dan sarananya. Sehingga, yang terjadi ialah defisit perdagangan seperti pada tahun 2000 dengan

defisit sebesar US\$ 104,7 juta dan semakin meningkat pada tahun 2008 sebesar US\$ 920,50 juta (Sotharith, 2010).

Tak hanya itu, Tiongkok juga hadir sebagai mitra dagang terbesar dan tujuan ekspor utama bagi negara-negara ASEAN, utamanya sejak diberlakukannya *ASEAN-China Free Trade Area*. Pada periode 2000 hingga 2010, perdagangan Tiongkok dan ASEAN naik hingga tujuh kali lipat menjadi US\$ 232 miliar, dan yang tertinggi ialah dengan Kamboja dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kamboja mengimpor bahan baku garmen, sepeda motor, mobil, bahan makanan, elektronik, furniture, obat-obatan hingga kosmetik dengan hasil yang meningkat pada tahun 2011 sebesar US\$ 2,5 miliar dari US\$ 791 juta pada 2009 (Heng, 2012).

Tabel III.5

Tabel Ekspor Barang Dari Tiongkok ke Kamboja

No.	Tahun	Total Nilai Ekspor Barang (US \$)
1.	2007	653.29 juta
2.	2008	933.44 juta
3.	2009	881.36 juta
4.	2010	1.153.6 miliar
5.	2011	1.733.65 miliar
6.	2012	3.354.64 miliar
7.	2013	2.992.06 miliar
8.	2014	3.710.08 miliar

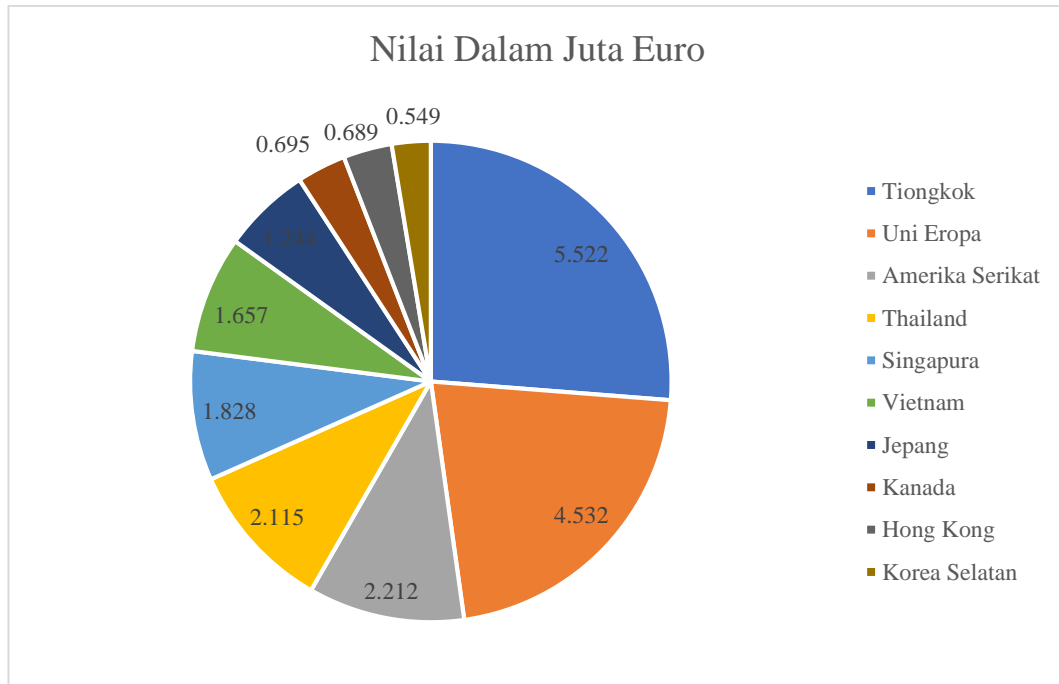
9.	2015	3.954.98 miliar
10.	2016	4.550.95 miliar
11.	2017	5.286.76 miliar

Sumber: Statista, 2018

Peningkatan ekspor barang dari Tiongkok juga terjadi pada periode 2007 hingga 2017, peningkatan tersebut terjadi pasca ditandatanganinya *comprehensive partnership* dan bahkan semakin melonjak pasca resminya *comprehensive strategic partnership* antara Tiongkok dan Kamboja, meskipun sempat menurun di tahun 2013. Bahkan di tahun 2017 nilai ekspor Tiongkok ke Kamboja mencapai US\$ 5,2 miliar, angka yang terbilang tinggi terlebih jika impor dari Kamboja dihitung lebih sedikit. Selain itu, pada grafik 3.3 menunjukkan bahwa Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar bagi Kamboja di tahun 2017.

Grafik III.3

Mitra Perdagangan Terbesar di Kamboja Tahun 2017



Sumber: Directorate-General for Trade European Commission, 2018

Tidak hanya di segi investasi dan *official development assistance* (ODA), Tiongkok juga menjadi mitra dagang terbesar bagi Kamboja. Terlihat dari tabel dan grafik diatas yang menunjukkan besarnya alur perdagangan diantara kedua negara. Namun, sangat disayangkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki Kamboja menyebabkan kurang maksimalnya ekspor yang dilakukannya, padahal Kamboja mendapat keuntungan dari pembebasan pajak yang diberikan Tiongkok bagi 418 barang atau produk Kamboja.

III.4 Pengaruh dan Kepentingan Tiongkok di Kamboja

Sejak hubungan bilateral Tiongkok dan Kamboja ditingkatkan menjadi *comprehensive strategic partnership* dari *comprehensive partnership*, arus *soft power* Tiongkok seperti investasi, ODA, perdagangan, hingga wisatawan asal Tiongkok meningkat pesat. Hal tersebut dikarenakan *comprehensive strategic partnership* mereka ditindak lanjuti dengan berbagai perjanjian yang mendukung.

Hubungan yang berdasar dari kunjungan Zhou Daguan di tahun 1296-1297, kemudian berlanjut ke hubungan diplomatik yang resmi dibangun pada Juli 1958, lalu pada tahun 2006 hubungan bilateral ditingkatkan menjadi *comprehensive partnership*, hingga akhirnya hubungan bilateral mereka mencapai *comprehensive strategic partnership* yang resmi ditandatangani pada 2010, menjadi pertanda bahwa hubungan kedua negara ini sangat dekat. Kunjungan resmi diantara pemimpin Tiongkok dan Kamboja juga kerap kali dilakukan guna menjaga persahabatan mereka. Tentu hal tersebut terlihat bagaikan sepasang sahabat yang sering berkunjung ke kediaman masing-masing, sehingga akan dianggap sebagai sahabat yang akrab. Begitu juga dengan Tiongkok dan Kamboja, bahkan Presiden Xi Jinping pernah mengatakan bahwa persahabatannya dengan Kamboja dapat menjadi contoh persahabatan yang tulus antar negara dan patut ditiru oleh negara-negara lain.

III.4.1 Pengaruh Tiongkok

Tidak hanya hubungan bilateralnya yang berkembang, Tiongkok dan Kamboja juga memiliki kerja sama yang dilakukan di Kamboja seperti *Belt and Road Initiative*, *Lancang Mekong Cooperation* dan pengembangan Zona Ekonomi Khusus di provinsi Krong Preah Sihanouk atau lebih populer dengan nama Sihanoukville, yang menambah intensitas kontak di antara keduanya. Untuk itu, penulis menemukan tiga pengaruh dari berbagai *soft power* Tiongkok terhadap Kamboja yang penulis ringkas menjadi

Tabel III.6

Hasil Analisis Pengaruh Tiongkok di Kamboja

Kedekatan	1. Kamboja 2 kali terlihat membela Tiongkok pada sengketa Laut Cina Selatan dengan memblokir pernyataan bersama ASEAN
	2. Tiongkok mendukung pemilihan umum Kamboja dari anggapan negara-negara Barat bahwa Kamboja telah merusak demokrasi pada 2017
	3. Beberapa pernyataan yang saling mendukung diantara keduanya
Kecintaan	Sentimen masyarakat yang diakibatkan dari fakta bahwa Tiongkok menjadi dalang dibalik <i>Khmer Rouge</i> , berubah menjadi kecintaan dengan antusiasnya masyarakat Tiongkok mempelajari bahasa mandarin, budaya Tiongkok dan turut meramaikan Tahun Baru Imlek
Kebutuhan	Agar mendapat manfaat dan keuntungan ekonomi dari menjamurnya investasi Tiongkok di Kamboja. Masyarakat Kamboja menjadi butuh untuk mempelajari bahasa mandarin

Sumber: Gao, 2018; Blanchard, 2018; Ear, 2012; Nika, 2017; Willemys, 2016; Aria & Sony, 2015; Ear, 2018; Loy, 2013; Meyn, 2013; Riddick, 2017

Pengaruh kedekatan didefinisikan sebagai intensitas hubungan dan kontak dari berbagai kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Kamboja yang berpengaruh terhadap sikap mereka pada kebijakan luar negeri maupun di forum-

forum internasional. Seperti yang dilakukan oleh Kamboja dalam mengeluarkan kebijakan tentang pelarangan melakukan kunjungan resmi ke Taiwan bagi para pejabat Kamboja. Lalu di forum internasional, Kamboja sudah dua kali terlihat seolah mendukung Tiongkok dengan memblok pernyataan bersama ASEAN yang mengutuk tindakan Tiongkok di Laut Cina Selatan di KTT ASEAN. Dan Tiongkok pun melakukan hal serupa dengan mendukung pemilihan umum yang dianggap oleh negara-negara Barat adalah sebuah tindakan yang merusak demokrasi karena membubarkan partai oposisi utama, sehingga negara-negara Barat memberikan sanksi ekonomi ke Kamboja, dengan menyatakan selamat atas kelancaran pemilihan umum dan terpilihnya kembali PM Hun Sen.

Dari pembahasan tentang kedekatan hubungan Tiongkok dan Kamboja tersebut, maka *soft power* yang dilakukan oleh Tiongkok di Kamboja menjadi alasan kuat mengapa Kamboja sangat bersyukur berteman dengan Tiongkok, meskipun masa lalu keduanya sempat memburuk hingga menimbulkan sentimen ditengah-tengah masyarakat. Namun sekali lagi, *soft power* Tiongkok mengubah hal tersebut menjadi kecintaan dan kebutuhan diantara masyarakat Kamboja.

Pengaruh kecintaan ditimbulkan dari *soft power* budaya dan pengaruh kebutuhan timbul dari *soft power* ekonomi Tiongkok. Pengaruh kecintaan didefinisikan sebagai adanya tindakan secara suka rela dalam mendukung atau membela, disini konteksnya Kamboja terhadap Tiongkok. Sedangkan pengaruh kebutuhan didefinisikan sebagai adanya kemauan untuk

Berubahnya sentimen masyarakat Kamboja menjadi kecintaan dan kebutuhan pada Tiongkok merupakan salah satu pengaruh dari *soft power* yang

dilakukan Tiongkok ke Kamboja. *Soft power* budaya dan ekonomi Tiongkok di Kamboja berkaitan, seperti contoh dengan bisnis Tiongkok yang menjamur di Kamboja, kemudian timbul keharusan bagi masyarakat untuk mempelajari bahasa mandarin guna memaksimalkan bisnis-bisnis tersebut agar mendapat keuntungan ekonomi baginya.

Kemudian pengaruh *soft power* ekonomi Tiongkok dapat memungkinkan Kamboja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan strategi pembangunan Kamboja bahkan dapat meningkatkan daya saingnya di regional. Dari sekarang pun sudah terlihat banyak fasilitas baru di Kamboja yang berdasar dari uang Tiongkok seperti jalan raya, jembatan hingga pembangkit listrik. Peningkatan infrastruktur tentu membuat Kamboja merasa terbantu, terlebih *soft power* yang diberikan Tiongkok tanpa adanya syarat-syarat demokrasi. Sehingga PM Hun Sen pun juga merasa beruntung karena dapat memperlama kekuasaannya di pemerintahan.

Muncul kritik dari pihak oposisi tentang besarnya pengaruh Tiongkok di Kamboja, seperti ketergantungan pada bantuan dan pinjaman lunak Tiongkok akan menyebabkan Kamboja terjebak dalam hutang luar negeri, sehingga berujung pada hilangnya sebagian kedaulatan negaranya. Ada juga yang mengatakan bahwa bantuan Tiongkok, termasuk proyek-proyeknya, kurang adanya transparansi karena bantuan yang diberikan Tiongkok tidak diiringi dengan tujuan pembangunannya, sehingga sangat rentan untuk korupsi (Khemara, 2014).

Meskipun *soft power* di Kamboja telah dilakukan sebelum adanya perjanjian *comprehensive strategic partnership*, namun setelah adanya peningkatan

hubungan tersebut *soft power* Tiongkok semakin meningkat ke Kamboja dan Kamboja menjadi tujuan utama *soft power* Tiongkok daripada negara-negara lain di Asia Tenggara, sehingga akan muncul pertanyaan tentang kepentingan Tiongkok di Kamboja.

III.4.2 Kepentingan Tiongkok

Selain pengaruh, penulis juga melihat adanya beberapa kepentingan dibalik *soft power* yang dilakukan Tiongkok ke Kamboja. Kepentingan-kepentingan ini tentunya untuk keuntungan Tiongkok. Untuk itu, penulis meringkas beberapa kepentingan Tiongkok di Kamboja ke dalam tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel III.7

Hasil Analisis Kepentingan Tiongkok di Kamboja

<i>International Support</i>	Untuk membentuk ikatan yang kuat dan dapat mendukung berbagai agenda kebijakan luar negeri dan pembentukan citra internasional.
Pengaruh yang lebih besar di Asia Tenggara	Jika pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara semakin besar, maka berbagai agenda kebijakan luar negeri dan proyek internasionalnya akan berjalan lancar, seperti BRI dan klaim terhadap Laut Cina Selatan.
Sumber Daya Alam (SDA)	Dengan mendapatkan SDA dari negara lain, maka akan menjadi keuntungan bagi Tiongkok dan

	kegiatan ekspor – impornya akan semakin berjalan lancar.
Geografis	Pelabuhan Sihanoukville di Kamboja akan menjadi lokasi strategis bagi Tiongkok untuk memproyeksikan dan meningkatkan kekuatan maritimnya di Teluk Thailand dan Selat Malaka. Karena kedua lokasi tersebut merupakan rute perdagangan yang cukup aktif.

Sumber: Sophal Ear, 2010; Dahles, 2013; Thomas Lum, 2008

Menggunakan pendekatan ekonomi melalui investasi, bantuan dan perdagangan untuk mencapai tujuan politik ialah instrumen *soft power* yang Tiongkok dilakukan di Asia Tenggara, termasuk Kamboja. Sebagai negara yang besar, Tiongkok menganggap perlu memiliki dukungan internasional, sehingga Kamboja menjadi salah satu tujuan Tiongkok untuk mendapatkan dukungan internasional di Asia Tenggara. Berbagai *soft power* yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya juga untuk mencapai tujuan politik Tiongkok yakni mendapatkan dukungan internasional. Dengan mendapatkan dukungan internasional, maka akan terbentuk ikatan yang kuat dan dapat mendukung agenda-agendanya terkait kebijakan luar negeri dan pembentukan citra internasional (Sophal Ear, 2010). Hal tersebut juga selaras dengan teori *soft power* yang dikemukakan oleh Joseph Nye.

Secara geografis, Tiongkok berdekatan dengan Asia Tenggara dan juga memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan, sehingga mencari dukungan politik di Asia Tenggara tentu akan menguntungkan bagi Tiongkok. Veto dua kali yang dilakukan oleh Kamboja terhadap pernyataan bersama ASEAN pada sengketa Laut Cina Selatan adalah salah satu contohnya. Selain itu, untuk membayar segala yang

telah diberikan oleh Tiongkok, sadar atau tidak, Kamboja setuju untuk melayani hampir berbagai keinginan dan kepentingan Tiongkok (Sopha Ear, 2010). Kemudian, pembangunan Zona Ekonomi Khusus Sihanoukville juga menjadi kepentingan tersendiri bagi Tiongkok yang mana secara geografis, Pelabuhan Sihanoukville dapat menjadi lokasi strategis untuk memproyeksikan kekuatan maritim Tiongkok ke Teluk Thailand dan Selat Malaka, dan kedua tempat tersebut juga merupakan rute perdagangan yang penting (Sopha Ear, 2010).

Melalui proposal kerja sama ekonomi dan kekuatan budaya, bagi Tiongkok, mengumpulkan pengaruh yang lebih besar di kawasan dan mengamankan sumber daya alam yang berlimpah untuk keuntungannya menjadi dua motivasi yang paling terlihat dalam upayanya menjaga hubungan kuat dengan Kamboja. Banyaknya keuntungan yang dirasakan Kamboja dari *soft power* Tiongkok dan kerap diungkapkan di forum internasional akan menjadi citra baik bagi Tiongkok, sehingga akan lebih mudah memperbesar pengaruhnya di Asia Tenggara, yang mana akan kembali pada agenda-agenda kebijakan luar negeri dan proyek internasionalnya seperti BRI dan menguasai Laut Cina Selatan. Sedangkan untuk pengamanan sumber daya alam, investasi Tiongkok di Kamboja tak hanya berasal dari kepentingan pemerintah, namun inisiatif swasta untuk mencari lahan subur dengan lingkungan yang makmur dan tumbuh (Sopha Ear, 2010).

Loyalitas dan kedermawanan Tiongkok kepada Kamboja dilihat sebagai cara Tiongkok yang sedang mencari akses untuk tenaga kerja yang murah, di saat pekerja Tiongkok menjadi lebih mahal. Sehingga, tenaga kerja Kamboja yang murah dan terkendali menjadi solusi bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk melakukan *outsourcing* dalam proses produksinya ke negara-negara yang biaya

tenaga kerjanya rendah, termasuk Kamboja. Selain itu, Kamboja juga menawarkan akses sumber daya alam, tanah pertanian, cadangan energi dan produk pertanian ke Tiongkok sebagai timbal balik atas loyalitas Tiongkok terhadapnya. Sehingga, para investor Tiongkok dapat mengambil keuntungan dari akses tersebut (Dahles, 2013). Seperti contoh *China's National Offshore Oil Corporation (CNOOC)* mendapat akses untuk menggali lumbung gas alam dan minyak di pantai-pantai Kamboja bersama dengan *Cambodian National Petroleum Authority (CNPA)* (Thomas Lum, 2008).